

## **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DANA DESA DI PULAU SUMATERA GUNA MENDORONG KEBERHASILAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**Kannitha Alana<sup>1</sup>, Rida Perwita Sari<sup>2</sup>**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jawa Timur”<sup>1,2</sup>  
ridaps.ak@upnjatim.ac.id<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas pelaksanaan dana desa di Pulau Sumatera terhadap keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, efektivitas pelaksanaan dana desa di Pulau Sumatera tahun 2017-2022, dan cara agar efektivitas pelaksanaan dana desa di Pulau Sumatera dapat mendorong keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah *mix method* dengan menggunakan WarpPLS 7.0. Populasi dan sampel penelitian ini adalah 131 kabupaten/kota penerima dana desa di Pulau Sumatera tahun 2017-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas dana desa berpengaruh terhadap keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan menurunkan tingkat kemiskinan dan kelaparan. Hal ini terlihat dari program-program yang diselenggarakan dengan memanfaatkan dana desa, dapat dikatakan cukup efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kelaparan. Simpulan, dana desa berpengaruh terhadap keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan menurunkan tingkat kemiskinan dan kelaparan yang terjadi di desa.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Efektivitas, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of the effectiveness of implementing village funds on the island of Sumatra on the success of the Sustainable Development Goals, the effectiveness of implementing village funds on the island of Sumatra in 2017-2022, and how the effectiveness of implementing village funds on the island of Sumatra can encourage the success of the Sustainable Development Goals. The research method used in this study is the mix method using WarpPLS 7.0. The population and sample of this study are 131 districts/cities receiving village funds on Sumatra Island in 2017-2022. The results of this study indicate that the effectiveness of village funds influences the success of the Sustainable Development Goals by reducing poverty and hunger rates. This can be seen from the programs implemented using village funds, which can be said to be quite effective in reducing poverty and hunger levels. In conclusion, village funds have an effect on the success of the Sustainable Development Goals by reducing the level of poverty and hunger that occurs in the village.*

**Keywords:** Village Funds, Effectiveness, Sustainable Development Goals

### **PENDAHULUAN**

Desa merupakan bentuk pemerintahan paling rendah di bawah kecamatan. Guna mendorong pemberdayaan desa yang ada di Indonesia, pemerintah mengeluarkan

kebijakan berupa pemberian dana desa kepada seluruh desa yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yang menyatakan bahwa salah satu bentuk pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prioritas penggunaan dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015, yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan.

**Tabel 1.**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Desa di Pulau Sumatera**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran (Dalam Miliar)</b>	<b>Realisasi (Dalam Miliar)</b>
2017	Rp 17.956,68	Rp 17.779,87
2018	Rp 17.974,68	Rp 17.162,32
2019	Rp 19.673,02	Rp 19.680,97
2020	Rp 19.815,81	Rp 19.793,31
2021	Rp 19.987,57	Rp 19.935,43
2022	Rp 18.567,66	Rp 18.530,97

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (2023)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa setiap tahunnya, dana desa yang dianggarkan pemerintah pusat untuk 10 provinsi di Pulau Sumatera mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2022. Pada tahun 2017 dan 2018, pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp17.956,68 miliar dan Rp17.974,68 miliar. Pada tahun 2019, dana desa yang dianggarkan sebesar Rp19.673,02 miliar. Pada tahun 2020, anggaran dana desa kembali meningkat menjadi Rp19.815,81 miliar. Tahun 2021, pemerintah meningkatkan penganggaran dana desa menjadi Rp19.987,57 miliar. Akan tetapi, pada tahun 2022, anggaran dana desa mengalami penurunan yang cukup banyak menjadi sebesar Rp18.567,66 miliar. Terkait dengan kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera pada tahun 2017-2019 cenderung mengalami penurunan. Kemudian, pada tahun 2020 dan 2021 cenderung mengalami peningkatan. Salah satu hal yang menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin tersebut karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaan. Hal ini membuat kemampuan ekonomi mereka menurun drastis. Berikut dapat dilihat jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera pada tahun 2017-2021.

**Tabel 2.**  
**Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Sumatera (Ribu Jiwa)**

<b>Provinsi</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aceh	830	832	810	815	834
Sumatera Utara	1327	1292	1261	1283	1344
Sumatera Barat	360	353	343	344	371
Riau	496	494	484	483	501
Jambi	279	281	273	278	294
Sumatera Selatan	1087	1076	1067	1082	1114
Bengkulu	303	304	298	303	306

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
Lampung	1084	1092	1041	1049	1084
Kep. Bangka Belitung	76	70	67	68	73
Kepulauan Riau	128	125	128	132	144

Sumber: BPS Sumatera Selatan (2023)

Terjadinya kemiskinan akan menimbulkan permasalahan lain yaitu kelaparan. Sejak pandemi Covid-19, tingkat prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini merupakan suatu penurunan di mana pada tahun-tahun sebelumnya telah menunjukkan perubahan yang baik (Rizaty, 2022). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan nasional ialah estimasi proporsi dari suatu populasi di mana memiliki konsumsi energi sehari-hari dari makanan tidak mencukupi untuk hidup normal dalam bentuk persentase (Badan Pusat Statistik, 2022). Semakin tinggi nilai prevalensi ini, makin tinggi juga persentase penduduk yang mengonsumsi makanan kurang dari kebutuhan energinya. Dalam Tabel 3, terlihat bahwa pada dari tahun 2017-2022, tingkat prevalensi berfluktuasi dan sebagian besar provinsi di Sumatera pada tahun 2022 mengalami peningkatan.

**Tabel 3.**  
**Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Pulau Sumatera**

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	8,4	8,68	9.41	8.58	6.90	10,98
Sumatera Utara	7,39	5,75	4.84	6.73	6.33	8,7
Sumatera Barat	5,53	5,45	4.90	5.86	6.02	7,31
Riau	8,61	9,66	8.32	9.16	10.61	15,12
Jambi	10,94	10,05	8.95	9.12	9.25	12,14
Sumatera Selatan	7,47	10,84	9.04	9.77	6.82	7,37
Bengkulu	12,51	8,71	7.66	7.72	8.64	11,66
Lampung	9,2	12,11	10.51	12.19	10.25	14,63
Kep. Bangka Belitung	9,61	10,07	7.85	9.35	11.05	15,19
Kep. Riau	4,09	4,38	4.08	6.07	7.71	11,3

Sumber: BPS (202

Terkait permasalahan tersebut, efektivitas penggunaan dana desa menjadi hal yang penting untuk dibahas karena dapat digunakan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan dari suatu program. Efektivitas dapat dikaitkan dengan pencapaian sasaran atau tujuan karena adanya dana desa ditujukan agar dapat diberikan dan dipergunakan secara maksimal kepada masyarakat desa. (Prayoga et al., 2020). Pasalnya, besarnya dana desa yang diterima rentan disalahgunakan dan rawan adanya penyimpangan.

Salah satunya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, di mana Inspektorat menemukan sejumlah penyalahgunaan penggunaan dana desa di daerah tersebut. Terdapat berbagai hal yang memengaruhi adanya penyalahgunaan tersebut, seperti kualitas dan integritas aparatur desa, regulasi dan kelembagaan, tata laksana desa, serta pengendalian dan pengawasan. Selain itu, 3 desa di wilayah Siberut Barat harus menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2018 karena adanya kesalahan penggunaan dana desa, yaitu pengerjaan proyek fisik yang terbengkalai serta upah dan material yang belum dibayarkan. Selain itu, penyelesaian proyek fisik juga sering terlambat (Mentawai Kita, 2019).

Tujuan dan prioritas penggunaan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sejalan dengan tujuan dari program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB merupakan suatu program yang disahkan pada bulan September 2015 di pertemuan tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Ramadhani & Prihantoro, 2020). TPB terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang ingin dicapai pada tahun 2030 (*International NGO Forum on Indonesian Development*, 2022).

TPB penting untuk dibahas serta diterapkan oleh Indonesia, khususnya desa, karena mengangkat isu atau persoalan global besar yang harus segera diselesaikan, seperti pendidikan, kemiskinan, kesetaraan, kesehatan, lingkungan, dan sebagainya. Guna mendukung dan meningkatkan pelaksanaan TPB di Indonesia, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 yang fokus pada pelaksanaan TPB Desa, di mana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa prioritas dana desa tahun 2021 akan fokus pada upaya mencapai TPB (Hafni et al., 2021). Selain itu, TPB Desa juga penting diterapkan karena membuat program pemerintah yang ada bisa tepat sasaran dalam pelaksanaannya serta dapat mencapai target dalam mewujudkan desa sehat dan tanpa kemiskinan (Kementerian PPN/Bappenas, 2022)

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh efektivitas pelaksanaan dana desa di Pulau Sumatera terhadap keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, efektivitas pelaksanaan dana desa di Pulau Sumatera tahun 2017-2022, dan cara agar efektivitas pelaksanaan dana desa di Pulau Sumatera dapat mendorong keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan.

Berkaitan dengan topik penelitian mengenai efektivitas dana desa dalam mendorong keberhasilan TPB, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Penelitian Taryani et al., (2022) mengenai penggunaan dana desa di Jawa Tengah dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi dana desa memiliki korelasi yang positif kuat dan signifikan dengan tingkat kemiskinan tahun 2019. Namun, tahun 2020 korelasi di antara keduanya menjadi positif lemah dan tidak signifikan karena pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada dana desa serta adanya perubahan kebijakan terkait tingkat kemiskinan desa yang menjadi dasar perhitungan alokasi dana desa.

Kemudian, pada tahun 2019 dan 2020, realisasi penyerapan dana desa memiliki korelasi negatif kuat dengan ketahanan pangan disebabkan adanya Covid-19 yang menimbulkan efek *multiplier effect* terhadap rumah tangga di mana terjadi PHK dan penurunan pendapatan masyarakat yang berimbas pada penurunan konsumsi makanan pokok. Hal ini sejalan dengan penelitian Wahyuddin et al., (2019) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa di Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya masih belum efektif di mana masih terjadi peningkatan kemiskinan.

## **KAJIAN TEORI**

### **Teori Pembangunan Berkelanjutan**

Para ahli mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai optimalisasi proses pembangunan dengan memanfaatkan potensi serta keterampilan manusia yang dikoordinasikan dengan sumber daya alam. Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai suatu jenis pembangunan yang mengacu pada pemanfaatan potensi alam dan manusia dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan sumber daya

yang saling bertentangan. Pembangunan berkelanjutan juga didefinisikan sebagai strategi pembangunan di mana penggunaan dan pemberdayaan sumber daya alam dan manusia, potensi investasi, perkembangan IT, dan transformasi kelembagaan dilakukan secara berimbang dengan memperhatikan potensi yang ada saat ini dan ketersediaan untuk memenuhi kepentingan hidup di masa mendatang (Fitriandari & Winata, 2021). Pilar pembangunan berkelanjutan terdiri atas berkelanjutan ekonomi, berkelanjutan sosial, dan berkelanjutan lingkungan. Ketiga hal tersebut harus berjalan dengan seimbang karena jika tidak, maka pembangunan akan terjebak pada model konvensional (Suparmoko, 2020).

### **Efektivitas**

Efektivitas dapat diukur dengan menggunakan analisis data efektivitas. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung efektivitas dana desa yaitu sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Dana Desa}}{\text{Target Anggaran Dana Desa}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas keuangan daerah, termasuk dana desa sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu sebagai berikut (Araujo et al., 2018).

- a) Persentase di atas 100% dikatakan sangat efektif.
- b) Persentase antara 90% - 100% dikatakan efektif.
- c) Persentase antara 80% - 89% dikatakan cukup efektif.
- d) Persentase antara 60% - 79% dikatakan kurang efektif.
- e) Persentase kurang dari 60% dikatakan tidak efektif.

### **Desa**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Dana Desa**

Definisi dana desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dianggarkan oleh pemerintah setiap tahunnya secara nasional yang kemudian akan disalurkan melalui APBD kabupaten/kota dan akhirnya ditransfer ke masing masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam pengalokasian dana desa, pemerintah memperhatikan sejumlah hal ; jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Pasal 3,5,6 PP No. 60 Tahun 2014).

### **Kemiskinan**

Menurut Suryawati dalam (Jacobus et al., 2018), kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok yang

mengakibatkan kurang mampu untuk menjamin keberlangsungan hidup. Kemiskinan juga didefinisikan sebagai ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan lain yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup (Jacobus et al., 2018). Selain itu, menurut Nugroho et al., (2020), indikator kemiskinan terdiri atas tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan.

### **Kelaparan**

Kelaparan didefinisikan oleh Lenhart (1989) dalam Mone & Utami (2021) sebagai suatu keadaan di mana terjadi kekurangan konsumsi pangan secara kronik atau keadaan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsinya. Tanziha (2007) melakukan pengembangan indikator kelaparan dari indikator proses dan output. Untuk indikator proses, seseorang dikatakan kelaparan jika persentase pengeluaran untuk pangan pokok di atas 23,15% dari total pengeluaran rumah tangga. Sedangkan untuk indikator output, seseorang dikatakan kelaparan apabila mengonsumsi nasinya kurang dari 2 kali per hari (Tanziha, 2012).

### **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) didefinisikan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet melalui pencapaian 17 tujuan sampai tahun 2030. Pada *website* TPB yang dikelola oleh *International NGO Forum on Indonesian Development* (Infid), dijelaskan bahwa TPB memiliki 17 target dari 169 target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Berdasarkan permasalahan dan teori yang ada, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah efektivitas dana desa berpengaruh terhadap keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Taryani et al. (2022) bahwa realisasi dana desa berkorelasi positif kuat dengan tingkat kemiskinan di tahun 2019 di Jawa Tengah. Hal ini disebabkan adanya formula di mana angka kemiskinan memiliki porsi 50% dari pagu alokasi formula. Sementara itu, efektivitas dana desa berbanding terbalik dengan ketahanan pangan, di mana ketika efektivitas dana desa meningkat maka IKP akan menurun (Taryani et al., 2022).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggabungkan dua pendekatan dalam satu penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Objek penelitian ini adalah efektivitas dana desa dan Tujuan Pembangunan berkelanjutan, sedangkan subjek penelitian adalah pagu dan realisasi dana desa tahun 2017-2022 di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan kabupaten/kota, persentase penduduk miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahakan Kemiskinan (P2), prevalensi ketidakcukupan pangan, dan prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang menerima dana desa tahun 2017-2022. Jumlah kabupaten/kota penerima dana desa adalah 131 kabupaten/kota. Sementara itu, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu semua populasi dijadikan sebagai sampel.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk memperoleh data terkait anggaran dan realisasi dana desa serta *website* Badan Pusat Statistik untuk data terkait kemiskinan dan kelaparan. Untuk pendekatan kuantitatif,

penelitian ini menggunakan teknik analisis data *structural equation modeling* (SEM) dengan *software* WarpPLS 7.0., di mana terdapat beberapa analisis yaitu analisis *outer model* (uji validitas), *inner model* (*R-squared*, *Q-squared*, dan uji model fit), dan uji hipotesis (Ghozali, 2020). Sementara itu, untuk pendekatan kualitatif, langkah analisis data yang digunakan ada 3 yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Agusta, 2003).

## HASIL PENELITIAN

### Validitas Konvergen

Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa manifest variabel dari suatu konstruk seharusnya berkolerasi tinggi. Uji validitas konvergen dapat dilihat dengan loading factor (korelasi antar skor item/skor komponen dengan skor konstruk) indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut. Dalam penelitian ini, apabila nilai factor loading  $>0,50$  atau muatan faktor signifikan (*p value*)  $<0,05$ , maka validitas konvergen terpenuhi.

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Validitas Konvergen**

No.	Indikator	<i>Factor Loading</i>	Keterangan	<i>P Value</i>	Keterangan
1	EF	1.000	Terpenuhi	$<0.001$	Terpenuhi
2	P1	0.972	Terpenuhi	$<0.001$	Terpenuhi
3	P2	0.941	Terpenuhi	$<0.001$	Terpenuhi
4	P0	0.931	Terpenuhi	$<0.001$	Terpenuhi
5	PKP	0.332	Terpenuhi	$<0.001$	Terpenuhi
6	PKK	0.321	Terpenuhi	$<0.001$	Terpenuhi

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel hasil uji validitas konvergen dengan menggunakan aplikasi WarpPLS 7.0 di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel telah valid atau memenuhi nilai validitas konvergen.

### Validitas Diskriminan

Untuk melakukan pengujian validitas diskriminan dengan indikator refleksif yaitu dengan melihat nilai *cross loading*, di mana suatu model dikatakan baik apabila setiap indikator memiliki nilai *loading* paling besar dibandingkan nilai *loading* lain terhadap variabel laten lainnya. Cara yang lain untuk dapat digunakan dalam menilai validitas diskriminan yaitu dengan membandingkan akar dari AVE untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model, yaitu akar kuadrat AVE  $>$  korelasi antar konstruk laten.

**Tabel 5.**  
**Hasil Uji Validitas Diskriminan pada X1**

No.	Indikator	<u>Loading</u> X1	<u>Cross Loading</u> Y	Keterangan
1	EF	1.000	0.000	Terpenuhi

Sumber: Data Diolah (2023)

**Tabel 6.**  
**Tabel hasil Uji Validitas Diskriminan pada Y**

No.	Indikator	<i>Loading</i>	<i>Cross Loading</i>	Keterangan
		Y	X1	
1	P1	0.972	0.033	Terpenuhi
2	P2	0.941	0.044	Terpenuhi
3	P0	0.931	0.004	Terpenuhi
4	PKP	0.332	-0.142	Terpenuhi
5	PKK	0.321	-0.095	Terpenuhi

Sumber: Data Diolah (2023)

**Tabel 7.**  
**Akar AVE dan Korelasinya**

No.	Variabel	Akar AVE		Keterangan
		X1	Y	
1	X1	1.000	0.010	Terpenuhi
2	Y	0.010	0.763	Terpenuhi

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji validitas diskriminan dengan indikator refleksif maupun akar AVE, diketahui bahwa masing-masing variabel telah memenuhi syarat dan dapat dikatakan memenuhi kriteria validitas diskriminan.

#### Uji *R-Squared* dan *Q-Squared*

**Tabel 8.**  
**Hasil *R-Squared* dan *Q-Squared***

No.	Variabel	<i>R-Squared</i>	<i>Q-Squared</i>
1	Y	0.005	0.005

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel di atas, nilai *R-Squared* pada pengujian terhadap variabel Y sebesar 0,005, yang memiliki arti bahwa variabel penjas dapat memberikan pengaruh sebesar 0,5% dan sisanya dijelaskan variabel lain di luar penelitian. Hal ini menunjukkan lemahnya pengaruh variabel X yaitu efektivitas dana desa dengan variabel Y yaitu keberhasilan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian, untuk nilai *Q-Squared* harus di atas 0 ( $> 0$ ) karena artinya variabel memiliki nilai prediktif (Maulana et al., 2021). Dalam pengujian terhadap variabel Y, nilai *Q-Squared* sebesar 0,005 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0 dan variabel penjas memiliki nilai prediktif.

#### Uji Model Fit

**Tabel 9.**  
**Uji Model Fit**

No	<i>Model Fit dan Quality Indices</i>	Kriteria Fit	Hasil Analisis	Keterangan
1	Average Path Coefficient (APC)	$P < 0,05$	0.069, $P = 0.013$	Memenuhi Syarat Model Fit



No	<i>Model Fit dan Quality Indices</i>	Kriteria Fit	Hasil Analisis	Keterangan
2	Average Full Collinearity VIF (AFVIF)	Diterima apabila $\leq 5$ , ideal $\leq 3.3$	1.000	Ideal
3	Tenenhaus GoF (GoF)	Small $\geq 0.1$ , medium $\geq 0.25$ , large $\geq 0.36$	0.062	Small
4	Sympson's Paradox Ratio (SPR)	Diterima apabila $\geq 0.7$ , ideal = 1	1.000	Ideal
5	R-Squared Contribution Ratio (RSCR)	Diterima apabila $\geq 0.9$ , ideal = 1	1.000	Ideal
6	Statistical Suppression Ratio (SSR)	Diterima apabila $\geq 0.7$	1.000	Diterima

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai APC sebesar  $P=0,013$  telah memenuhi kriteria fit model yaitu  $P<0,05$ . Selanjutnya, nilai AFVIF dikategorikan ideal sebesar 1,000 telah memenuhi syarat yaitu diterima apabila bernilai  $\leq 5$  dan idealnya bernilai  $\leq 3,3$ . Untuk nilai GoF dikategorikan *small* sebesar 0,062. Kemudian, nilai SPR dikategorikan ideal sebesar 1,000 dan telah memenuhi syarat yaitu diterima apabila bernilai  $\geq 0,7$  dan idealnya bernilai 1. Selanjutnya, nilai RSCR dikategorikan ideal sebesar 1,000 dan telah memenuhi syarat yaitu diterima apabila bernilai  $\geq 0,9$  dan idealnya bernilai 1. Selanjutnya, untuk nilai SSR sebesar 1,000 dan telah memenuhi syarat yaitu diterima apabila bernilai  $\geq 0,7$ .

**Tabel 10.**  
**Uji Hipotesis Pengaruh Langsung**

No.	Hubungan Antar Variabel		Koefisien Jalur	P-Value	Keterangan
1	X1	Y	0.069	0.026	Berpengaruh

Sumber: Data Diolah (2023)

Bahwa efektivitas dana desa berpengaruh terhadap keberhasilan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menurunkan tingkat kemiskinan dan kelaparan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *p-value* sebesar 0,026, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel di atas, diketahui bahwa efektivitas dana desa berpengaruh terhadap keberhasilan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari nilai perolehan koefisien jalur sebesar 0,069 dengan *p-value* sebesar 0,026. Dikarenakan nilai  $0,026 < 0,05$ , maka dapat dikatakan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Berdasarkan hasil dari koefisien jalur menunjukkan besaran pengaruh efektivitas dana desa terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan sebesar 6,9% (lemah). Artinya terdapat banyak faktor-faktor lain yang memengaruhi kemiskinan dan kelaparan, di mana keduanya menjadi salah satu tolak ukur dalam

menentukan keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam penelitian Taryani et al., (2022), dijelaskan bahwa ada beberapa penyebab kemiskinan, seperti adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya sehingga timbul ketimpangan, adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, dan adanya perbedaan akses dalam modal. Begitu pula dengan kelaparan. Dengan mengalokasikan dana desa, hal ini dapat menjadi hanya menjadi salah satu langkah atau solusi untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Di sisi lain, hal ini sejalan dengan pemanfaatan dana desa masih cenderung berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar. Sementara itu, untuk pemberdayaan masyarakat, masih banyak wilayah yang belum menggunakan dana desa secara optimal untuk tujuan ini. Padahal dengan adanya sedikit fokus pada pemberdayaan masyarakat, maka dapat menggali potensi desa dan menciptakan kegiatan ekonomi kreatif desa yang nantinya dapat digunakan sebagai mata pencaharian masyarakat setempat (Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, 2018).

Lemahnya pengaruh dana desa terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan dan kelaparan, karena penggunaan dana desa lebih difokuskan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik sehingga tidak memberikan *multiplier effect* terhadap peningkatan perekonomian desa. Dana desa sendiri hanya mampu mengurangi kemiskinan sebesar 12,7%. Hal lain yang memengaruhi lemahnya pengaruh dana desa terhadap kemiskinan dan kelaparan adalah alokasi yang cukup rendah dibanding TPB lain. Pada tahun 2018, alokasi dana desa untuk TPB Nomor 1 yaitu tanpa kemiskinan sebesar Rp370.617.622.561 atau 0,64% dari total dana desa. Sementara itu, untuk TPB Nomor 2 yaitu tanpa kelaparan sebesar Rp1.996.098.399.921 atau sebesar 3,46% dari total dana desa. Kemudian pada tahun 2019, terjadi peningkatan pada alokasi untuk TPB Nomor 2 yaitu menjadi sebesar Rp3.618.742.718.691 atau 5,42% dari total dana desa. Untuk TPB Nomor 1, besaran alokasi tidak mengalami banyak perubahan yaitu sebesar Rp417.308.508.210 atau 0,63% dari total dana desa (Permatasari et al., 2021).

Selain itu, dana desa juga banyak dipergunakan untuk meningkatkan jumlah BUMDes dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta memberikan peluang usaha maupun lapangan pekerjaan. Akan tetapi, kesadaran dan pemanfaatan BUMDes oleh masyarakat ternyata masih rendah. Meskipun terdapat sejumlah BUMDes yang mampu berkembang dan membuka lapangan kerja kepada masyarakat, tidak banyak BUMDes yang mampu melakukan hal tersebut dan tidak ada pula peningkatan lapangan kerja yang signifikan di desa tersebut. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa pengaruh dari dana desa terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan termasuk lemah (Permatasari et al., 2021).

Terkait dengan alokasi dana desa di Pulau Sumatera, berikut anggaran, realisasi, dan tingkat efektivitas penggunaannya. Berdasarkan tabel di bawah ini, diketahui bahwa selama 5 tahun, penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif di mana terlihat besaran rasionya lebih dari 90%.

**Tabel 11.**  
**Anggaran, Realisasi, dan Efektivitas Dana Desa di Pulau Sumatera**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran (Dalam Miliar)</b>	<b>Realisasi (Dalam Miliar)</b>	<b>Efektivitas</b>
2017	Rp 17.956,68	Rp 17.779,87	99,02%
2018	Rp 17.974,68	Rp 17.162,32	95,48%

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran (Dalam Miliar)</b>	<b>Realisasi (Dalam Miliar)</b>	<b>Efektivitas</b>
2019	Rp 19.673,02	Rp 19.680,97	100,04%
2020	Rp 19.815,81	Rp 19.793,31	99,89%
2021	Rp 19.987,57	Rp 19.935,43	99,74%
2022	Rp 18.567,66	Rp 18.530,97	99,80%

Sumber: Data Diolah (2023)

Pulau Sumatera tercatat sebagai daerah penerima dana desa terbanyak kedua setelah Pulau Jawa. Dari total 10 provinsi yang ada di Sumatera, Provinsi Aceh menjadi penerima dana desa tertinggi, sedangkan Kepulauan Riau menjadi penerima dana desa terendah. Provinsi Aceh menjadi penerima dana desa tertinggi karena memiliki jumlah desa terbanyak dibandingkan provinsi lain yaitu sebanyak 2.435 desa. Hal ini menunjukkan bahwa dana desa yang diberikan bergantung pada jumlah desa yang ada di wilayah tersebut (Agustina et al., 2021).

Meskipun Aceh menjadi penerima dana desa tertinggi, masih banyak pengimplementasian dana desa yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pada tahun 2021 di Kabupaten Aceh Tenggara, permasalahan *stunting* belum menjadi hal yang dipahami oleh masyarakat maupun tokoh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tablet tambah darah (TTD) dan pemberian makanan tambahan (PMT) yang diberikan oleh posyandu ternyata tidak dikonsumsi secara maksimal. Sarana air minum yang memadai di Aceh Tenggara juga hanya sedikit yaitu sebanyak 40% dari total sarana air minum yang ada. Hal ini mengharuskan masyarakat untuk membeli air jerigen. Kemudian untuk persoalan sanitasi, sebanyak 7.079 keluarga di Aceh tenggara belum memiliki jamban yang layak. Pemerintah setempat telah menggunakan dana desa untuk membangun jamban tetapi tidak dikelola dan difungsikan dengan baik (Ilmi, 2023).

Hal serupa juga terjadi di wilayah Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di wilayah tersebut, dana desa masih banyak dipergunakan untuk melakukan pembangunan fisik yang sifatnya tidak produktif, seperti gapura desa dan pos jaga. Hal ini cukup disayangkan mengingat pembangunan tersebut tidak berdampak pada aspek ekonomi maupun kesehatan masyarakat. Di sisi lain, untuk bidang pemberdayaan masyarakat belum ada pendampingan pada kelompok masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan hanya sebatas pada pemberian penyuluhan. Untuk pengembangan BUMDes sendiri juga belum mampu mengembangkan potensi wisata yang ada di desa, melainkan hanya terbatas pada usaha sewa kursi dan tenda BUMDes (A. Lestari & Utama, 2021).

**Tabel 12.**  
**Program Pengentasan Kemiskinan dan Kelaparan dari Dana  
Desa di Pulau Sumatera**

<b>No.</b>	<b>Nama Provinsi</b>	<b>Program</b>
1	Aceh	1) Pemberian bantuan kepada BUM Kute (Malahayati & Isnaini, 2022); 2) Peningkatan gizi anak usia dini melalui PAUD; 3) Pembangunan jamban/toilet (Ilmi, 2023); 4) Pengembangan usaha ekonomi produktif dan pelestarian lingkungan hidup; 5) Penyelenggaraan pelatihan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna (Usman et al., 2020).

No.	Nama Provinsi	Program
2	Sumatera Utara	1) Pembangunan jalan; 2) Pengadaan pasar desa; 3) Pembibitan tanaman pangan; 4) Pengadaan lumbung desa; 5) Pembukaan lahan pertanian; 6) Pengembangan usaha ikan dan ternak; 7) Pelatihan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna (Gurning, 2020); 8) Penyelenggaraan program Padat Karya Tunai (PKT) berupa penimbunan sirtu dan pembangunan rabat beton (Risa et al., 2021); 9) Penyelenggaraan posyandu serta penambahan makanan balita dan lansia; 10) Pembangunan MCK; 11) Pembangunan jalan ke lahan pertanian (Tambunan et al., 2020).
3	Sumatera Barat	1) Pemberdayaan posyandu; 2) Pembangunan jalan nagari; 3) Pembangunan irigasi, jembatan, jamban, dan air bersih; 4) Pengembangan BUMNag; 5) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat (Gusti et al., 2020); 6) Pelaksanaan PMT secara intensif kepada ibu hamil dan anak berusia 2 tahun sserta memberikan pelatihan dan insentif kepada kader posyandu (Yasri & Yusran, 2022)
4	Sumatera Selatan	1) Pembangunan jalan menuju kebun warga; 2) Penyuluhan mengenai potensi desa; 3) Pengembangan BUMDes (A. Lestari & Utama, 2021); 4) Pembangunan sumur (Purnawan, 2020).
5	Bengkulu	1) Pelaksanaan intervensi gizi, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi, kesadaran dan praktik pengasuhan gizi, dan sebagainya (Kurniawan et al., 2021); 2) Pembangunan jalan lingkungan dan jembatan; 3) Pembangunan sumur bos untuk memenuhi kebutuhan air bersih; 4) Pembuatan perkebunan jahe dengan memanfaatkan lahan tidur oleh ibu rumah tangga serta menjadikan jahe tersebut sebagai produk minuman bermerek Jahe Raflesia; 5) Pembuatan koperasi simpan pinjam (Darmi & Mujtahid, 2019)
6	Jambi	1) Pembangunan jalan usaha tani (Fikrman et al., 2020); 2) Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan bak pembuangan sampah umum; 3) Pembangunan jamban sehat (Miranti & Sekarina, 2022).
7	Bangka Belitung	1) Pengembangan hutan wisata mangrove Desa Kurau Barat (Fikri & Septiawan, 2020); 2) Pembangunan embung desa, sumur, dan sambungan air bersih; 3) Pembangunan MCK; 4) Pembangunan jalan desa, drainase, dan irigasi; 5) Penyelenggaraan posyandu/polindes (Agustina et al., 2021).
8	Riau	1) Pembangunan sarana air bersih; 2) Penyelenggaraan pos kesehatan, posyandu, dan desa siaga kesehatan; 3) Pembangunan drainase; 4) Pemberdayaan posyandu, UP2K, dan BKB (Hamidah & Panjaitan, 2021); 5) Pemberian makanan tambahan dan tablet tambah daerah (TTD) (P. Lestari et al., 2022).

No.	Nama Provinsi	Program
9	Kepulauan Riau	1)Pembangunan jalan desa, jembatan, drainase, dan irigasi; 2) Penyediaan air bersih; 3) Penyelenggaraan posyandu dan polindes; 4) Pembangunan MCK; 5) Pendirian atau penyertaan modal BUMDes; 6) Pemberian pelatihan kepada masyarakat; 7) Pembinaan pertanian/perikanan (Arianto et al., 2019)
10	Lampung	1) Pengembangan BUMDes; 2) Pemasaran produk milik KWT (Mutolib et al., 2019); 3) Peningkatan gizi bayi, balita, dan ibu hamil; 4) Penyediaan sarana air bersih; 5) Pembangunan MCK; 6) Penyediaan makanan sehat bagi balita keluarga tidak mampu dan perawatan kesehatan ibu hamil serta menyusui (Adyas & Karbito, 2019).

Sumber: Data Diolah (2023)

Meskipun demikian, terdapat sejumlah desa yang melakukan pembangunan fisik yang lebih bernilai ekonomi, seperti pembangunan jalan. Adanya akses jalan yang baik memudahkan para petani dalam menjual hasil pertaniannya ke pusat pertumbuhan Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu Baturaja, di mana dahulu para petani menjualnya kepada tengkulak dengan harga yang murah. Dengan menjualnya langsung ke Baturaja, para petani dapat menjualnya dengan harga yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat BUMDes (A. Lestari & Utama, 2021).

Selain itu, beberapa provinsi lain di Sumatera, seperti Sumatera Utara dan Riau juga menyelenggarakan program Padat Karya Tunai (PKT) untuk membangun jalan, rabat beton, maupun jembatan. Program ini umumnya melibatkan masyarakat desa yang termasuk kategori miskin dan sedang menganggur untuk dijadikan kerja. Nantinya, para pekerja ini akan dibayar secara tunai, bisa berupa upah harian maupun mingguan, sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan secara tidak langsung akan menurunkan angka *stunting* (Hamidah & Panjaitan, 2021) (Risa et al., 2021)

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dana desa berpengaruh terhadap keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan menurunkan tingkat kemiskinan dan kelaparan yang terjadi di desa. Secara rasio, penggunaan dana desa di Pulau Sumatera sudah efektif karena berada di atas angka 90%. Meskipun alokasi dana desa untuk pengentasan kemiskinan masih tergolong rendah, tetapi untuk pengentasan kelaparan sudah cukup tinggi. Melihat program-program yang diselenggarakan dengan memanfaatkan dana desa, dapat dikatakan cukup efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kelaparan. Meskipun demikian, pemerintah desa perlu mengoptimalkan lagi penggunaan dana desa dengan perlahan mulai memfokuskan pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adyas, A., & Karbito, D. (2019). BBLR diprediksi Faktor Utama Kejadian Stunting di Provinsi Lampung : Warning untuk Ibu Bekerja dan Penerapan Pola Asuh. *Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 11(4), 325–335. <https://doi.org/10.52022/jikm.v11i4.48>
- Agusta, I. (2003). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Bogor: Litbang

Pertanian.

- Agustina, S., Valeriani, D., & Kesuma, A. (2021). The Relationship of Village Funds to Poverty and Economic Growth in Bangka Belitung Islands. *Pareto: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.32663/pareto.v4i1.1164>
- Araujo, M. De, Wiagustini, N. L. P., & Purbawangsa, I. B. A. (2018). Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Daerah Distrik Dili. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12, 2535. <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i12.p04>
- Arianto, B., Putri, N. A. D., & Askarmin. (2019). Pemanfaatan Dana Desa dan Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Kepulauan (Studi di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(2), 144–153. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v9i2.622>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Persen)*. [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data/0000/data/1473/sdgs\\_2/1#:~:text=Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau,sehat%2C yang dinyatakan dalam bentuk](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1473/sdgs_2/1#:~:text=Prevalensi%20ketidacukupan%20konsumsi%20pangan%20atau,sehat%2C%20yang%20dinyatakan%20dalam%20bentuk)
- Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2019). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, 3(1), 547–566. <https://doi.org/10.31506/jipags.v3i1.5484>
- Fikri, Z., & Septiawan, Y. (2020). Pemanfaatan Dana Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Kurau Barat. *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, Dan Sosial (Publicio)*, 2(1), 24–32. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2635075&val=24571&title=PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA KURAU BARAT](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2635075&val=24571&title=PEMANFAATAN%20DANA%20DESA%20DALAM%20PENGEMBANGAN%20DESA%20WISATA%20DI%20DESA%20KURAU%20BARAT)
- Fikrman, Amri, S., & Susilawati, W. (2020). Peran Dana Desa dalam Pembangunan Pertanian di Desa Kapuk Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin. *Jurnal Agri Sains*, 4(1), 20–30. <https://doi.org/10.36355/jas.v4i1.358>
- Fitriandari, M., & Winata, H. (2021). Manajemen Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Competence: Journal of Management Studies*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v15i1.10424>
- Ghozali, I. (2020). *Partial Least Squares Konsep, Metode dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPLS 7.0* (4th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gurning, W. L. (2020). Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Sumatera Utara. *Tansiq*, 3(1), 27–41. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/view/8120>
- Gusti, Y., Agustar, A., & Osmet. (2020). Pemanfaatan Dana Desa dan Kaitannya dengan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 265–285. <https://doi.org/10.31955/mea.v4i2.379>
- Hafni, R., RS, P. H., & Nanda, E. D. (2021). PkM Mendigitalisasi Desa Menuju Capaian SDGs. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(3), 109–114. <https://ceredindonesia.or.id/index.php/jas/article/view/568>
- Hamidah, L., & Panjaitan, R. P. (2021). Penggunaan Dana Desa di Desa Tasik Juang Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ekonis: Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 11(2), 314–329. [10.37932/j.e.v11i2.385](https://doi.org/10.37932/j.e.v11i2.385)

- Ilmi, B. (2023). Analisis Strategi Penurunan Angka Stunting Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021. *Jurnal Penelitian Progressif*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7650357>
- International NGO Forum on Indonesian Development. (2022). *Sustainable Development Goals*. <https://www.sdg2030indonesia.org/#modalIconDefinition>
- Jacobus, E. H., Kindangen, P. ., & Walewangko, E. N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 86–103. <https://doi.org/10.35794/jpekd.19900.19.7.2018>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2022). 1. Tanpa Kemiskinan. <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-1/>
- Kurniawan, I., Misnaniarti, & Flora, R. (2021). Analisis Implementasi Intervensi Gizi Spesifik dalam Penanganan Stunting di Puskesmas Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. *Jumantik*, 6(4), 328–336. <https://doi.org/10.30829/jumantik.v6i4.10089>
- Lestari, A., & Utama, A. S. (2021). Evaluasi Dana Desa Di Kabupaten Ogan Komering Ulu ( Potret Setengah Dasawarsa Penyelenggaraan Dana Desa ). *Journal of Government and Social Issues (JGSI)*, 1(1), 53–60. <https://jgsi.fisip.unila.ac.id/index.php/Jurnal/article/view/6>
- Lestari, P., Pralistami, F., Ratna, D., Hamijah, S., & Harahap, R. A. (2022). Peranan Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting Di Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 2227–2230. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2789>
- Malahayati, R., & Isnaini. (2022). Pengelolaan dan penggunaan dana desa pada Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh tahun 2019-2021. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2239–2249. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2350>
- Maulana, I., Wildan, M. A., & Andriani, N. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan Dimoderasi Oleh Karakteristik Dewan Komisaris. *Jurnal Akuntansi*, 13, 173–187. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i1.2934>
- Mentawai Kita. (2019). *Dana Desa, Jumlah Besar Rawan Penyimpangan*. <https://www.mentawaiKita.com/baca/2857/dana-desa-jumlah-besar-rawan-penyimpangan>
- Miranti, & Sekarina, L. (2022). Penerapan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2020. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 73–97. <https://doi.org/10.36355/jppd.v4i1.39>
- Mone, D. M. V, & Utami, E. D. (2021). Determinan Kelaparan di Indonesia Tahun 2015-2019. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2021(1), 547–556. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.962>
- Mutolib, A., Nikmatullah, D., Effendi, I., Viantimala, B., & Rahmat, A. (2019). Kontribusi Dana Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura , Kabupaten Pesawaran , Provinsi Lampung. *JSHP*, 3(1), 10–19. <https://doi.org/10.32487/jshp.v3i1.535>
- Nugroho, D., Asmanto, P., & Adji, A. (2020). Leading Indicators Kemiskinan Di Indonesia: Penerapan pada Outlook Jangka Pendek. In *The Nasional Team For The Acceleration Of Poverty Reduction (TNP2K)* (Vol. 49).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015,

- (2015). <https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pm-desa-no-5-tahun-2015-tentang-penetapan-prioritas-penggunaan-dana-desa.pdf>
- Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., & Wardhana, I. W. (2021). The village fund program in indonesia: Measuring the effectiveness and alignment to sustainable development goals. *Sustainability*, 13(12294), 1–30. <https://doi.org/10.3390/su132112294>
- Prayoga, I. M. A. S., Mulyati, D., & Rowa, H. (2020). Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(1), 42–57. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/1466>
- Purnawan, H. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Makartitama dan di Desa Ulak Mas Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. *MIMBAR Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1), 35–55. <https://doi.org/10.32663/jpsp.v9i1.1235>
- Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. (2018). *Kajian Manfaat Dana Desa dalam Percepatan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan Desa*. Fiskal.Kemenkeu.Go.Id. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2018/07/02/132003146906279-kajian-manfaat-dana-desa-dalam-percepatan-pembangunan-dan-pengentasan-kemiskinan-des>
- Ramadhani, R. W., & Prihantoro, E.-. (2020). Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(02), 117–129. <https://doi.org/10.46937/18202028913>
- Risa, H., Badaruddin, & Tanjung, M. (2021). Implementasi Program Padat Karya Tunai dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading. *Perspektif*, 10(2), 739–753. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5207>
- Rizaty, M. A. (2022). *Prevalensi Ketidakcukupan Pangan di Indonesia Naik pada 2021*. <https://DataIndonesia.Id/>. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/prevalensi-ketidakcukupan-pangan-di-indonesia-naik-pada-2021>
- Suparmoko, M. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39–50. <https://doi.org/10.36080/jem.v9i1.1112>
- Tambunan, B. H., Sihombing, M., & Harahap, R. H. (2020). Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. *Perspektif*, 9(2), 438–446. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3942>
- Tanziha, I. (2012). Pengukuran dan Indikator Kelaparan Serta Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya. *Mini Seminar Food Security In Indonesia Social and Cultural Approach* (Dits, 19–27. [https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/60701/PROS2012\\_IKT?sequence=1](https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/60701/PROS2012_IKT?sequence=1)
- Taryani, A., Rahma, N. N., Alam, N. S., Putri, R. Y. E., Belindasari, R. R. A. D., & Suparjito. (2022). Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan Dan Kelaparan Dengan Dana Desa (2019-2020) Di Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(1), 112–125. <https://doi.org/10.35794/jpekd.42849.23.1.2022>
- Usman, Latief, A., & Hariadi, J. (2020). Pendampingan Pengelolaan Dana Desa. *Global*



*Science Society: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 270–278.  
<https://www.ejurnalunsam.id/index.php/gss/article/view/2028>

- Wahyuddin, W., Ramly, A., Djalil, M. A., & Indriani, M. (2019). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 16(2), 181–193. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i2.2410>
- Yasri, A., & Yusran, R. (2022). Implementasi Program Laskar Nagari Peduli Pangan dan Gizi (LNPPG) dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Padang Pariaman. *Publicness: Jurnal of Public Administration Studies*, 1(1), 30–35. <https://doi.org/10.24036/publicness.v1i1.4>